



What's on APINDO
Juni 2024

**PANDANGAN APINDO ATAS TERBITNYA
UNDANG - UNDANG KESEJAHTERAAN IBU & ANAK PADA FASE
1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (KIAFSHPK)**



DAFTAR ISI

2

Tim Redaksi

3

**Sorotan Utama: Pandangan APINDO
atas UU Kesejahteraan Ibu & Anak**

5

Advokasi APINDO

11

**Opini Pengurus: Masukan APINDO
atas Pemilihan Calon Pimpinan &
Dewan Pengawas KPK**

13

Kabar dari Anggota

16

Program Unggulan

22

Kegiatan Bidang DPN APINDO

47

APINDO Daerah

65

Save The Date:

- Rakerkonas
- Program Taplai

69

Sosial Media APINDO

TIM REDAKSI

Dewan Pengarah

Shinta W. Kamdani
Eddy Hussy
Sanny Iskandar
Aloysius Budi Santoso

Editor In Chief

Rudolf Saut

Redaktur Pelaksana

Dian Noeh

Kontributor

DPP Seluruh Indonesia
Edi Silaban

Penulis

Septiyan Listiya

Layouter

Septiyan Listiya



SOROTAN UTAMA

Pandangan APINDO Dalam Undang - Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan (R)ancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (KIAFSHPK) menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Juni 2024. Untuk itu, APINDO menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1 Penerapan UU KIA timbulkan keraguan

Penerapan UU KIA di dunia kerja khususnya Pasal 4 dan Pasal 6 menimbulkan keragu-raguan mengingat substansi yang diatur dalam UU KIA sama dalam pasal 82 UU No. 6/ 23 jo 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

2 Perbedaan terminologi & periode menjalankan cuti melahirkan

- Dalam (R)UU KIA menggunakan istilah "cuti melahirkan" sedangkan dalam UU 13/03 menggunakan istilah "istirahat melahirkan".
- Lamanya pemberian waktu "cuti/istirahat" melahirkan dan pendampingan istri yang melahirkan.

3 Perlu kejelasan mengenai " istirahat" melahirkan pada pekerja perempuan yang melahirkan

Terkait dengan kedua hal tersebut di atas, diperlukan kejelasan apakah untuk pekerja perempuan yang melahirkan, berhak atas "istirahat" melahirkan yang diatur dalam UU No. 6/23 jo. UU No.13/03, atau berhak atas "cuti" melahirkan yang diatur dalam pasal 4 UU KIA, atau berhak atas hak yang diatur dalam kedua UU tersebut.

4

Tidak ada amanat penyusunan Peraturan Turunan Pasal 4,6 & 9

Dalam UU KIA tidak terdapat amanat untuk menyusun peraturan turunannya baik PP maupun PerPres untuk kedua pasal tersebut. Namun untuk menghindari kebingungan yang akan menciptakan ketidak pastian di tempat kerja, kami mengharapkan berdasarkan pasal 9 UU tersebut, dapat diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan dari Menteri Ketenagakerjaan.

5

Substansi Petunjuk Pelaksanaan & Petunjuk Teknis

Substansi dari Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tersebut diharapkan dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:

- Penegasan bahwa yang dimaksudkan sebagai "cuti melahirkan" dalam pasal 4 UU KIA adalah sama dengan "istirahat melahirkan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 82 UU no.6/23 jo. UU no. 13/2003;
- Penegasan bahwa bagi pekerja perempuan yang melahirkan mendapatkan hak "cuti melahirkan" sebagaimana diatur dalam UU KIA Pasal 4 ayat (3) butir a
- Penjelasan tentang pelaksanaan pasal 4 ayat (3) butir a. dikaitkan dengan ayat (5), yaitu pelaksanaan hak cuti melahirkan 3 (tiga) bulan berikutnya karena "kondisi khusus", tidak diberlakukan secara otomatis/langsung 3 (tiga) bulan, tetapi sesuai perkembangan kesehatan pekerja perempuan tersebut berdasarkan surat keterangan dokter.
- Elaborasi dari Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi "Selain cuti pendampingan dalam ayat (2), suami diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri dan/atau Anak" khususnya untuk butir a dan b, agar diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

6

Keterlibatan APINDO dalam Penyusunan Rancangan PP Turunan

APINDO berharap dapat dilibatkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU tentang KIAFSHP khususnya yang akan mengatur tentang dukungan fasilitas, sarana dan prasarana di tempat kerja (pasal 30).



ADVOKASI APINDO

Audiensi APINDO Bersama Stakeholders TAPERA

APINDO bersama dengan REI, Serikat Pekerja dan Bank BTN bertemu dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan membahas pemanfaatan Program MLT untuk perumahan berkaitan dengan bergulirnya Peraturan baru terkait Tapera, Jumat (7/6/2024) di kantor BP Jamsostek. Dlm pertemuan dibahas sejumlah opsi agar MLT dapat lebih kompetitif utk optimalisasi pemanfaatannya oleh Pekerja.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum APINDO Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar dan Eddy Hussy, Anton Supit, Agung Pambudhi, Joko Suranto (Ketum REI), Raymond (Sekjen REI), Hirwandi (Direktur Consumer BTN), Ristadi (Presiden KSPN), Dedi Hardianto (Sekjen KSBSI).



Brainstorming APINDO Pasca Terbitnya Perpres No.59/2024



Komite Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan APINDO menyelenggarakan Brainstorming Pasca lahirnya Perpres no. 59 Tahun 2024, Senin (10/6/2024) di kantor APINDO. Hadir sebagai narasumber Anggota Komite Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan APINDO Iftida Yasar dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agung Pambudhi.



Komite Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan APINDO menyelenggarakan Brainstorming Pasca lahirnya Perpres no. 59 Tahun 2024, Senin (10/6/2024) di kantor APINDO. Hadir sebagai narasumber Anggota Komite Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan APINDO Iftida Yasar dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agung Pambudhi.

Perpres no. 59/2024 diatur Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), perluasan kriteria pekerja PHK yang mendapatkan gratis penjaminan selama 6 bulan, batas bawah perhitungan upah Pekerja Penerima Upah (PPU) usaha mikro dan kecil di bawah UMR, ruang penjaminan korban kekerasan melalui JKN jika tidak dijamin oleh skema penjaminan lembaga lain, pengaturan teknis kebutuhan dasar kesehatan dari Kemenkes, denda layanan menjadi maksimal 20 juta dari sebelumnya 30 juta, dan penyediaan akses data dan informasi secara digital kepada stakeholders. Fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait Impelementasi KRIS, Koordinasi Antar Pemberi Jaminan (KPAJ), dan Perluasan Kriteria PHK.



APINDO Gelar Sosialisasi Undang – Undang Anti Monopoli



APINDO bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sosialisasi Undang-Undang Antimonopoli, Ketentuan Merger, Serta Akuisisi pada Kamis (13/6/2024) di kantor APINDO.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar mengungkapkan, UU ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan memastikan persaingan usaha sehat. Dengan demikian, konsumen mendapatkan harga kompetitif dan adil.

APINDO juga menyambut baik adanya program kepatuhan persaingan usaha tersebut. APINDO juga berharap agar prosesnya bagi pengusaha dapat mudah dan tidak menjadi beban baik itu bagi pengusaha maupun bagi KPPU.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa memaparkan mengenai Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menunjukkan upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat, dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha.



Dalam acara tersebut, Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono memaparkan kewajiban notifikasi ke KPPU atas kegiatan merger/akuisisi. Dengan dimoderatori Ketua Komite Kebijakan Sektoral Bidang Kebijakan Publik APINDO, Candra Wahjudi, diskusi menghadirkan narasumber Deputy Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto dan Anggota KPPU Eugenia Mardanuvraha.



APINDO Terima Audiensi BP Tapera



APINDO menerima audiensi BP Tapera, Kamis (20/6/2024) di kantor APINDO. Hadir mendampingi Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Darwoto, Ketua Komite Pengupahan Bidang Ketenagakerjaan APINDO Subchan Gatot, Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Myra M. Hanartani, Dani Handajani dan Inda D. Hasman.



Hadir dari BP Tapera, diantaranya Komisioner Heru Pudyo Nugroho, Deputy Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Sugiyarto, Deputy Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma, Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan Alfian Arief dan lainnya.



Dalam audiensi tersebut dibahas pandangan APINDO terkait Tapera dimana APINDO menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: diperlukan keselarasan regulasi tapera, diskusi dengan para stakeholders sebelum implementasi tapera diberlakukan untuk sektor swasta, adanya potensi penambahan beban iuran bagi pekerja dan pengusaha mengingat aturan turunan P2SK akan diberlakukan akhir tahun 2024, dan mengusulkan program Tapera bagi sektor swasta menjadi iuran sukarela.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru memaparkan sejumlah hal terkait Tapera, diantaranya Dasar Hukum Operasional Tapera, Dana yang dikelola BP Tapera dan Dukungan Fiskal Pemerintah untuk Pembiayaan Perumahan, dll.





OPINI PENGURUS



Masukan APINDO Bagi Pemilihan Calon Pimpinan & Calon Dewan Pengawas KPK

Bagaimana Bapak melihat fenomena terjadinya korupsi dalam dunia usaha?

Korupsi banyak kaitannya dengan dunia usaha, dan umumnya terjadi karena terpaksa seperti pengurusan perizinan usaha yang dihambat dalam waktu panjang sehingga menimbulkan kerugian.

Sutrisno Iwantono

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO

Bagaimana Bapak melihat fenomena terjadinya korupsi dalam dunia usaha?

Korupsi banyak kaitannya dengan dunia usaha, dan umumnya terjadi karena terpaksa seperti pengurusan perizinan usaha yang dihambat dalam waktu panjang sehingga menimbulkan kerugian.

Apa masukan Bapak agar dunia usaha tidak terjerat kasus korupsi?

Untuk itu, saya mengusulkan agar sistem Whistleblowing dikedepankan dengan memberikan perlindungan kepada pihak yang menyampaikan laporan tentang terjadinya penyuapan, termasuk pihak yang dipaksa untuk menyuap.

Hal ini untuk memberikan keberanian bagi yang dipaksa untuk menyuap untuk melapor. Dengan demikian, pejabat yang menerima suap tidak akan lagi berani menerima suap karena pasti akan dilaporkan oleh pemberi suap.

Bagaimana menurut Bapak kriteria ideal Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK?

Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK seharusnya adalah pihak yang independen yang tidak terafiliasi oleh partai politik maupun birokratif pemerintahan agar tidak terkooptasi oleh kepentingan mereka.

Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK haruslah seorang yang memiliki integritas tinggi yang tidak pernah punya catatan track record/ rekam jejak tercela.

Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK juga bukan seorang Job Seeker karena pekerjaan pimpinan di lembaga KPK bukan untuk orang yang mencari pekerjaan dengan motivasi untuk mendapatkan gaji dan fasilitas maupun lompatan karier. Hal ini karena kedudukan di Lembaga KPK adalah pengabdian kepada rakyat Indonesia.

Selain itu, Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK diusahakan sebagai orang/pribadi sukses di dalam profesi masing-masing, sehat jasmani dan rohani serta sudah selesai dengan dirinya sendiri baik secara ekonomi maupun non-ekonomi.

Untuk itu, kandidat sebaiknya di atas 50 tahun karena sudah matang dan tidak ada ambisi tentang harta maupun kedudukan. Biasanya orang yang demikian tidak mau mendaftar untuk jabatan seperti ini. Oleh karena itu, panitia seleksi harus melakukan penelusuran dan menjemput bola dengan memotivasi orang-orang yang memang layak dengan jabatan tersebut.

Bagaimana kontribusi APINDO dalam mendorong anggotanya dalam pencegahan korupsi di dunia usaha?

Dalam mendukung Pencegahan Korupsi, APINDO secara regular mengadakan sosialisasi bekerja sama dengan berbagai pihak secara regular dengan mengundang anggota-anggota APINDO hadir mengikuti sosialisasi.



KABAR DARI ANGGOTA

Anggota APINDO Ikuti Training Hubungan Industrial & SDM di Jepang

*"APINDO tidak hanya membantu para leaders untuk terus update dengan situasi terkini dalam dunia bisnis, namun kami sebagai karyawan juga berkesempatan untuk turut serta mengikuti berbagai training dan juga seminar dengan topik terkini.
Terus maju APINDO."*

Magdalena Santoso, Head of Performance Management & People Development PT AKR Corporindo Tbk

Berkesempatan untuk berpartisipasi dalam The Program on Industrial Relations and Human Resource Management-2 (ERHR2) merupakan sebuah pengalaman yang membanggakan.

Program yang terselenggara atas kerjasama APINDO dan The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) Japan ini, tidak hanya memberikan kesempatan untuk dapat mempelajari best practice yang telah dilakukan Jepang dalam pengelolaan sumber daya manusianya, namun juga membuka kesempatan untuk dapat berbagi pengalaman dengan rekan-rekan dari berbagai negara.



Program ini disusun secara Hybrid, yang terdiri dari sesi pertemuan virtual serta onsite learning yang dilakukan di Tokyo, Jepang. Setiap peserta dalam program ini didorong untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam setiap diskusi sehingga membuat suasana seminar menjadi lebih hidup.

Salah satu sharing yang didapatkan adalah terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan sumber daya manusianya sehingga tidak hanya siap memasuki dunia kerja namun dapat bekerja sesuai dengan standard yang dibutuhkan di market.

Peserta mendapat kesempatan untuk mengunjungi Tokyo Metropolitan Vocational Skills Development Center serta Tokyo Telework Promotion Center. Di sana tersedia berbagai program pelatihan bersertifikasi untuk ahli listrik, pipa, kayu, cat, penjahit serta perawat.



Perubahan cara bekerja yang terjadi sejak digitalisasi juga menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Jepang. Berbagai fasilitas, sarana dan prasarana terus dikembangkan dan diupayakan untuk mendukung hal tersebut, dan ini terlihat dari berbagai teknologi yang tersedia dan dikembangkan di Tokyo Telework Promotion Center.

Dari berbagai materi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia yang tepat akan menentukan kesuksesan dan juga keberlangsungan dari sebuah organisasi.

Untuk itu, memastikan agar pelatihan yang diberikan tepat sasaran, memperlengkapi dengan sarana dan prasana yang tepat serta lingkungan kerja yang kondusif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Investasi yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia akan mendorong motivasi, komitmen, loyalitas hingga engagement dari sumber daya manusia dan mendorong organisasi/ perusahaan untuk terus bertahan dalam berbagai situasi, baik ataupun buruk.

Namun perlu diingat bahwa pengelolaan sumber daya manusia bukanlah sesuatu yang pasti. Kita harus terus melakukan review dan improvement seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi.

Seperti prinsip Kaizen yang menjadi salah satu key success factor bagi berbagai organisasi di Jepang, demikian juga pengelolaan sumber daya manusia harus terus agile dalam menjawab berbagai tantangan zaman.



PROGRAM UNGGULAN

FGD Program Inklusi Keuangan bagi UKM, Kerjasama APINDO UMKM – ILO



Sejak Maret 2023, ILO telah memulai tahap implementasi proyek PROMISE IMPACT phase 2 (PROMISE II IMPACT) yang bermitra dengan APINDO UMKM bertujuan untuk meningkatkan skala usaha, produktifitas dan keberlanjutan UKM melalui peningkatan akses layanan keuangan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Saat ini telah dimulai proses digitalisasi ekosistem rantai nilai beberapa komoditas yaitu komoditas susu sapi perah milik Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan di Jawa Barat, komoditas rumput laut milik PT. Algae Sumba Timur Lestari (Astil) di Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur, dan komoditas minyak nilam milik Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala di Aceh Besar di Aceh. Proyek ini juga memberikan pelatihan bagi pelaku UKM dalam hal pengelolaan keuangan dan pengetahuan kewirausahaan.

Selain itu perhatian khusus kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) diberikan untuk meningkatkan layanan kepada UKM melalui pelatihan dan pemberian bantuan teknis pengembangan kapasitas digitalisasi perbankan antara lain berupa penguatan Core Banking System dan penggunaan teknologi digital untuk manajemen resiko kredit yang lebih baik, sebagai upaya percepatan transformasi digital BPR.

Selanjutnya dukungan atas penguatan kebijakan dan program Dewan Nasional Keuangan Inklusif untuk peningkatan akses keuangan bagi UKM dan akselerasi keuangan inklusif juga merupakan salah satu kegiatan dalam implementasi proyek ini.

Sebagai bentuk laporan progress dan peningkatan kegiatan, ILO mengadakan Project Advisory Committee Meeting. Ketua Komite Kewirausahaan dan Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Inklusif APINDO bidang UMKM Lishia Erza hadir dalam pertemuan tersebut, Kamis (6/6/2024) di Jakarta.



Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan laporan mengenai perkembangan dari implementasi sejak Januari 2023 hingga Maret 2024, mendiskusikan rencana kegiatan proyek kedepan dan mendorong kolaborasi serta sinergi diantara mitra proyek.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Ekonomi RI Ferry Irawan memberikan penghargaan kepada tiga lokasi fokus yaitu Industri Nilam di Aceh, Program Kredit Merdeka untuk petani rumput laut di NTT, dan Koperasi Peternak Bandung Selatan untuk peternak sapi perah di Jawa Barat.

Kolaborasi APINDO dan Diplomat Success Challenge (DSC) Dukung Pertumbuhan UMKM Berkelanjutan



APINDO terus berkomitmen menciptakan ekosistem pendukung UMKM sebagai inisiator utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu, APINDO turut berkolaborasi dengan Diplomat Success Challenge (DSC), yang diinisiasi oleh Wismilak Foundation, sebagai ekosistem kewirausahaan yang telah eksis sejak tahun 2010.

APINDO dan DSC memiliki tujuan sama dalam membangun UMKM di Indonesia dengan melakukan kolaborasi sehingga akan menciptakan program-program berdampak sebagai perkuatan ekosistem dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Pada Kick Off & Press Conference pada Kamis (20/6/2024) di Jakarta, DSC Season 15 kembali hadir dengan komitmen yang semakin kuat untuk membantu UMKM menciptakan kesuksesan bersama dan menemukan solusi bisnis berdampak bagi masyarakat Indonesia dengan berbagai program inovatif dan kolaboratif.

DSC Season 15 dibuka oleh Ketua Umum APINDO Shinta Widjaya Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO Ronald Walla, Ketua ASEANSI dan Pengurus Bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif APINDO Susanty Widjaya, dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut.



APINDO sangat mendukung kolaborasi strategis yang dilakukan bersama dengan DSC.

Mulai dari peran aktif DSC di program APINDO UMKM Akademi dan program APINDO UMKM Merdeka, hingga kolaborasi dalam memperkuat literasi kewirausahaan masyarakat yang telah dilakukan bersama.

Di season 15 ini, DSC juga akan berkolaborasi kembali dengan APINDO dalam menyiapkan showcase event untuk para UMKM di Indonesia. Kewirausahaan kolaboratif ini akan terus berkembang, memberikan manfaat yang lebih besar dan membangun ekosistem yang semakin kuat.



Forum Diskusi Pengembangan Investasi Berkelanjutan Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif



Dalam rangka peningkatan investasi di industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan International Tourism Investment Forum (ITIF) tahun 2024, Rabu – Kamis (5-6/6/2024) di Jakarta. Tahun ini Kemenparekraf mengangkat topik berkelanjutan untuk menekankan pentingnya peningkatan ekonomi sambil tetap menjaga kekayaan lokal.

Kegiatan diisi oleh pembicara dan undangan dari berbagai kalangan dari pemerintah, duta besar, organisasi internasional, pelaku usaha dan industri kreatif, hingga investor untuk bersama membahas perkembangan, tantangan, dan kesempatan dalam pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.



Pada hari kedua, Ketua Komite Kewirausahaan dan Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Inklusif Bidang UMKM dan Koperasi APINDO Lishia Erza ditunjuk sebagai Moderator dalam sesi isu iklim dan kesempatan investasi terutama dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hadir sebagai pembicara Direktur AVPN Asia Tenggara Dini Indrawati Septiani, Sutradara dan Pemilik Studio Gamplong Hanung Bramantyo, Direktur Utama Studio Antarupa Ivan Chen, Lead Tim Infrastruktur IFC Indonesia Lamtiurida Hutabarat, Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia Listyorini Dian Pratiwi, dan Direktur Manajer PT Industri Pameran Nusantara Ryan Adrian.

Diskusi ini menitikberatkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan nilai dari hak cipta produk-produk industri kreatif, perluasan value chain, dan pentingnya peran pemerintah mendorong dan mendukung perkembangan industri.





KEGIATAN BIDANG DPN APINDO

Members Gathering APINDO “Kupas Tuntas TAPERA”

APINDO menggelar Members Gathering “Kupas Tuntas Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)”, Senin (3/6/2024) di kantor APINDO. Hadir sebagai moderator Wakil Sekretaris Umum APINDO M. Aditya Warman, narasumber sebagai berikut Ketua Komite Pengupahan Bidang Ketenagakerjaan APINDO Subchan Gatot, Pengurus Bidang Ketenagakerjaan APINDO Joko Baroto, dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut.

Dalam paparannya, Subchan Gatot memaparkan sejumlah aturan dalam Tapera, Standpoint APINDO terkait Tapera, dan MLT BPJS Ketenagakerjaan. Members Gathering ini dihadiri ratusan anggota APINDO.



APINDO Tanggapi Hasil Survei Publik “Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha Melalui OSS - RBA



Wakil Sekretaris Umum APINDO, Anggana Bunawan memberikan tanggapan atas hasil survei dalam Diseminasi Hasil Survei Publik Periode 2023 ‘Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission - Risk Based Aproach (OSS-RBA)’ yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, Rabu (5/6/2024) di Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut APINDO memberikan sejumlah masukan terkait berbagai kendala dalam penggunaan OSS-RBA. Salah satu aspek yang mengemuka adalah kerumitan dari penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam proses pembuatan Nomor Induk berusaha (NIB).

Ketua APINDO Diskusi Kepemimpinan & SDM Bersama Agus Harimurti Yudhoyono



Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani diundang sebagai narasumber dalam FGD pengumpulan data penelitian disertai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertema “Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia (SDM)” bersama para praktisi, ahli, dan tokoh lainnya dari Pemerintah dan Non-Pemerintah, Rabu (5/6/2024) di The Dharmawangsa Jakarta.

Shinta mengungkapkan, kunci transformasi ekonomi Indonesia adalah transformasi pada faktor pendukung produktivitas melalui kolaborasi dengan pemerintah.

Reformasi struktural juga menjadi pendorong kunci untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan diantaranya melalui kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi; kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas; optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi, dan persaingan yang sehat; adopsi ESG oleh bisnis dan mengembangkan industri hijau; serta keberadaan infrastruktur, transisi energi, dan tersedianya sarana dan prasarana digital.

Dalam diskusi ini, Shinta juga menyerahkan hasil studi APINDO bersama ERIA dan BAPPENAS terkait Skills Development di sektor Manufaktur yang relevan dalam peningkatan kualitas SDM dan tantangan ekosistemnya. Dunia usaha meyakini bahwa pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 merupakan tugas bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Audiensi APINDO Bersama World Bank Country Director



Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Mari Elka Pangestu dan Chatib Basri mengadakan pertemuan dengan World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk beserta jajaran Pakar World Bank, Senin (3/6/2024) di kantor World Bank Jakarta. Studi difokuskan untuk mendapatkan potensi reformasi dalam rangka meningkatkan efisiensi pasar di bidang manufaktur dan jasa.

Pertemuan diinisiasi oleh Bank Dunia yang sedang melakukan studi dalam rangka mempercepat pertumbuhan jangka panjang. Dalam studi tersebut, dilakukan sejumlah analisa mengenai kinerja sejumlah perusahaan di bidang manufaktur dan jasa serta kontribusi sejumlah perusahaan.

Studi difokuskan bagaimana fungsi pasar mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Studi juga mencakup kebijakan sektor manufaktur dan jasa yang dapat menarik investasi, mendorong inovasi dan adopsi teknologi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik.

Tujuan dari studi tersebut adalah mendorong perumusan sejumlah masukan konkret untuk reformasi dalam rangka percepatan pertumbuhan jangka panjang. Dalam pertemuan tersebut, Bank Dunia memaparkan temuan awal dan rekomendasi dari studi tersebut, dan untuk itu sejumlah tokoh dalam pertemuan tersebut diminta memberikan masukan.



APINDO Gelar Digital Industry Executive Education Program



APINDO Bidang Digital bekerjasama dengan Monash University Indonesia menggelar Digital Industry Executive Education Program, Selasa (11/6/2024) di Kampus Monash University Jakarta, BSD.

Digital Industry Executive Education Program merupakan rangkaian inisiatif APINDO untuk mendukung pembuatan kebijakan Industri Digital.

Program Executive Education ini dirancang sebagai sarana pemberdayaan bagi para pembuat kebijakan, profesional, dan mitra industri dalam memahami dan menavigasi kompleksitas industri digital sehingga dapat menciptakan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani menyampaikan apresiasinya kepada tim bidang Digital APINDO yang telah mencanangkan program untuk meningkatkan kemampuan para pemangku kebijakan industri digital dalam menganalisa perubahan lingkungan teknologi, sehingga memiliki pemahaman menyeluruh saat menyusun kebijakan dan mengambil keputusan di masa depan.

Ia menambahkan, hal ini juga sesuai dengan visi APINDO dan pemerintah, yang telah bersepakat bahwa ekonomi digital menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kemajuan dan daya saing nasional.

Sejumlah topik yang akan dibahas dalam program ini, diantaranya Digital Technology and Policy, Sustainable Environmental & Social Governance, dan Public-Private Partnerships for Sustainability.

Hadir dalam acara tersebut President Monash University Indonesia Matthew Nicholson, Ekonom Chatib Basri, dan Wakil Ketua Bidang Digita APINDO Tirza Reinata Munusamy.



APINDO Terima Audiensi Jakarta Japan Club (JJC)



APINDO menerima audiensi Chairperson Jakarta Japan Club (JJC) Shinichi Kikuchihara, Kamis (13/6/2024) di kantor APINDO.

Delegasi JJC diterima oleh Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Didit Ratam, Pengurus Bidang Hubungan Internasional APINDO Leila Djawas, Pengurus Bidang Investasi APINDO Imam Liyanto, Agus Gunawan dan Nurhadijono Nurjadin.

Dalam audiensi tersebut, JJC memperkenalkan Mr Shinichi sebagai Chairperson JJC yang baru terpilih. Shinichi berkomitmen untuk lebih mempererat kerjasama yang telah terjalin sebelumnya dengan APINDO, khususnya di bidang Ketenagakerjaan.

JJC juga memaparkan sejumlah ketertarikan pada potensi kerjasama dalam beberapa Bidang, diantaranya UMKM, karbon, energi terbarukan, dan investasi. Selain itu, JJC juga berdiskusi dengan APINDO mengenai pemerintahan baru Prabowo – Gibran.

Rapat Dewan Pimpinan Harian (DPH) APINDO



APINDO menggelar Rapat Dewan Pimpinan Harian (DPH), Selasa (18/6/2024) di kantor APINDO. Hadir Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar dan Franky Sibarani, Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi Santoso, serta Ketua dan/atau Wakil Ketua atau Pengurus yang mewakili dari masing-masing bidang.

Dalam paparannya, Shinta mengajak Pengurus APINDO untuk hadir dalam Rakerkonas APINDO ke XXXIII yang akan digelar di Surabaya pada 28 – 30 Agustus 2024 serta berpartisipasi dalam program Taplai Lemhannas yang diselenggarakan pada 9 – 15 September 2024.

Dalam meeting DPH ini dibahas pencapaian program dari masing-masing bidang dan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian APINDO. Dibahas sejumlah isu diantaranya Tapera, UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), Udpate dan rekomendasi kebijakan impor, Devisa Hasil Ekspor (DHE), Perpajakan, Pelemahan Rupiah, Advokasi Kebijakan Perikanan, Sosialisasi Program KIPAS Stunting, Pelaksanaan Digital Industry Executive Education UMKM Merdeka, Education Sharing program, dll.



Diskusi Artificial Intelligence dan Dampaknya Terhadap Pasar Kerja Indonesia



Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani memberikan closing remarks dalam Diskusi “Artificial Intelligence and Implication on the Indonesian Labour Market”, Kamis (20/6/2024) di Jakarta. Hadir memberikan sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (secara daring) dan Deputy Direktur Jenderal ILO Celeste Drake.

Menurut laporan terbaru BPS, sektor teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengembangan AI, mempekerjakan lebih dari 2 juta pekerja pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kontribusi besar AI dalam menciptakan peluang kerja baru.

Dalam paparannya, Shinta mengatakan meskipun pengembangan AI membawa dampak positif, tantangan utama terletak pada memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang diperlukan untuk terlibat secara efektif dalam ekonomi digital ini. Pendidikan dan pelatihan yang komprehensif sangat penting untuk memberdayakan angkatan kerja agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin saling terhubung dan didorong oleh teknologi.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi dalam merumuskan peta jalan yang komprehensif. Hal ini mencakup penilaian dampak buruk di seluruh sektor industri, uji tuntas yang proaktif, dan kerangka kebijakan yang mencakup peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada tiga tujuan utama.

Pertama, memastikan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan untuk mendorong kebutuhan lapangan kerja di masa depan. **Kedua**, menyelaraskan pendidikan dan keterampilan dengan produktivitas tenaga kerja, mengatasi kesenjangan keterampilan sekaligus menganjurkan pembelajaran seumur hidup. **Ketiga**, mendorong keterlibatan masyarakat yang strategis, memastikan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri. **Terakhir**, memperkuat perlindungan sosial dan jaring pengaman bagi individu yang terkena dampak transformasi teknologi.



AI diharapkan tidak hanya sebagai katalis inovasi namun juga pendorong penting transformasi pasar tenaga kerja. Penerapan AI yang strategis bertujuan untuk menciptakan peluang kerja berkualitas tinggi, membangun keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan, dan menjembatani kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat.

Tujuannya adalah memastikan integrasi AI menghasilkan manfaat yang adil, memperluas akses pasar kerja global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, lapangan kerja di masa depan memerlukan perlindungan sosial yang kuat dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, yang mendukung kebutuhan siklus hidup.

Hadir sebagai Panelis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Warsito, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Perwakilan dari Microsoft serta Instansi Perbankan, dengan moderator Employment and Labor Market Specialist ILO Diego Rei.



Dialog Sosial Menuju Transisi Energi Adil Melalui Perundingan PKB



Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut menjadi narasumber dalam Workshop “Perspektif Pengusaha Mengenai Dialog Sosial Menuju Transisi Energi yang Adil melalui perundingan PKB, khususnya di industri pertambangan batubara”, Jumat (21/6/2024) di Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bekerjasama dengan ILO.

Dalam paparannya, Rudolf mengungkapkan Indonesia bersama masyarakat global menghadapi tantangan diantaranya perubahan iklim, dekarbonisasi, dan Net Zero Emission (NZE).

Untuk itu, transisi energi sudah harus dilakukan. Meskipun demikian, menjadi tidak realistis jika secara langsung menghilangkan batu bara dimana energy mix masih lebih dari 50% berasal dari batu bara. Oleh karenanya, hal ini terus didorong untuk menemukan jalan tengah yang affordable, available, dan sustainable termasuk mendorong perusahaan penyedia teknologi untuk beramai-ramai melakukan riset dan berkompetisi untuk mendapatkan teknologi tepat dan murah.

Selain itu, pengusaha, pekerja, dan pemerintah diharapkan untuk duduk bersama dalam menghasilkan regulasi yang mampu mengakomodir kepentingan tiap pihak agar tercapai transisi energi berkeadilan bagi pekerja.

APINDO Paparkan Kajian Tengah Tahun 2024 Perkembangan Sektor Usaha di Tengah Gejolak Ekonomi Domestik & Global



Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani memberikan paparan dalam Kajian Tengah Tahun 2024 bertopik “Perkembangan Sektor Usaha di Tengah Gejolak Ekonomi Domestik dan Global” yang diselenggarakan Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Selasa (25/6/2024) di Jakarta.

Menurut Shinta, Kinerja dunia usaha saat ini cenderung stabil, namun juga memiliki tantangan besar untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Kinerja seluruh sektor/Lapangan Usaha (LU) tercatat positif dengan peningkatan terbesar terjadi pada sektor:

- (1) industri pengolahan (1,71%),
- (2) Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil Motor (1,61%) seiring meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Pemilu 2024 dan bulan Ramadan, dan
- (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,44%) sejalan dengan dimulainya panen dan faktor musiman pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pertumbuhan produktifitas ekonomi di sisi pelaku usaha juga terkendala oleh high cost of doing business di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi negara dengan biaya logistik, biaya supply chain, biaya energi, biaya tenaga kerja, dan biaya pinjaman termahal diantara negara ASEAN-5.

Biaya logistik perdagangan Indonesia mencapai 23,5% dari PDB, relatif tidak efisien dan tidak kompetitif untuk perdagangan bila dibandingkan dengan beberapa negara seperti Malaysia (13% dari PDB), China (16% dari PDB), atau Singapura (8% dari PDB).

Meskipun Bappenas menyatakan bahwa biaya logistik Indonesia sudah turun menjadi 14- 15% pada 2023. Kenyataannya, LPI 2023 memperlihatkan adanya pelemahan yang signifikan dalam performa logistik Indonesia, khususnya dari segi ketepatan waktu, kualitas layanan, tracing-tracking & efisiensi pelayaran internasional.

Biaya perdagangan Indonesia pun masih menjadi yang termahal & terlama pengurusannya di kawasan, khususnya dalam hal impor. Ini sangat menyulitkan eksportir Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bahan baku/penolong & barang modal untuk menciptakan produktifitas yang maksimal karena industri hulu & domestic supply chain yang lemah belum bisa menggantikan kebutuhan impor secara kompetitif. Kondisi ini menjadi dis-insentif peningkatan partisipasi Indonesia dalam GVCs/RVCs dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan.

Terlebih, survey APINDO juga memperlihatkan bahwa affordability logistik perdagangan menjadi salah satu enabler besar untuk menciptakan pertumbuhan ekspor yang agresif di samping peningkatan opsi & affordability pembiayaan perdagangan. Di samping itu, ICOR Indonesia pun merupakan yang tertinggi di ASEAN-5 sehingga menjadi beban & resiko tambahan bagi realisasi investasi di sisi pelaku usaha nasional maupun asing.





High-Cost Economy Indonesia berdampak pada stagnasi pertumbuhan produktifitas manufaktur dan ekspor. Indonesia juga mengalami sejumlah tantangan reformasi struktural seperti regulasi, perijinan, dan konsistensi kebijakan, penciptaan lapangan kerja, kualitas SDM untuk lompatan produktivitas, percepatan industrialisasi, digitalisasi ekonomi, dan transformasi hijau.

Dalam roadmap perekonomian APINDO, terdapat 5 prioritas rekomendasi reformasi struktural untuk pemerintahan mendatang, yaitu:

1. Kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi
2. Kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas
3. Optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi, dan persaingan yang sehat
4. Adopsi ESG oleh bisnis dan mengembangkan industri hijau
5. Keberadaan infrastruktur, transisi energi, dan tersedianya sarana dan prasarana digital

APINDO Bicara dalam Banking Series: Pertumbuhan Kredit di Tengah Ancaman Risiko Global

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menjadi pembicara dalam Banking Series: Pertumbuhan Kredit di Tengah Ancaman Risiko Global yang diselenggarakan Akurat.co, Selasa (25/6/2024) di Jakarta.

Shinta mengungkapkan, ekspansi dunia usaha bergantung pada stabilitas makroekonomi & ketersediaan dana untuk investasi dan beroperasi. Untuk itu, dunia usaha membutuhkan Suku bunga pinjaman kompetitif dan Kemudahan akses pinjaman.

Sementara itu, fokus kredit harus diberikan pada sejumlah sektor prioritas dimana pertumbuhan kredit pada sektor padat modal sangat tinggi (sektor pertambangan & penggalian), sedangkan pada sektor padat karya (sektor pertanian) justru sebaliknya.



Sementara itu, fokus kredit harus diberikan pada sejumlah sektor prioritas dimana pertumbuhan kredit pada sektor padat modal sangat tinggi (sektor pertambangan & penggalian), sedangkan pada sektor padat karya (sektor pertanian) justru sebaliknya.

Selain itu, sektor padat karya seperti pertanian juga memiliki kontribusi signifikan pada penyerapan tenaga kerja, namun pertumbuhan kreditnya lemah. Sehingga perlu untuk didorong dengan diberikan insentif khusus agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

Sektor keuangan yang inklusif, kuat, berkelanjutan, dan berkinerja baik diperlukan untuk membiayai investasi jangka panjang, modal kerja, hingga pinjaman konsumen.

Lebih lanjut, kedalaman dan efisiensi sektor keuangan belum memadai untuk memenuhi ambisi investasi. Pada tahun 2022, sektor keuangan besarnya 120% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio M2 terhadap PDB berkisar di angka 45% (2021). Berdasarkan kedua angka tersebut, Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya maupun negara-negara maju yang sektor keuangannya telah mencapai 300% dari PDB.

Untuk itu, Sektor keuangan yang inklusif, kuat, berkelanjutan, dan berkinerja baik diperlukan untuk membiayai investasi jangka panjang, modal kerja, hingga pinjaman konsumen.

Selain pendalaman sektor keuangan, perluasan sektor keuangan juga penting dilakukan. Secara khusus, pasar modal harus menjadi sumber pendanaan yang lebih besar, termasuk untuk investasi jangka panjang.

Ketua Bidang Perdagangan APINDO Jadi Panelis dalam Indonesia Cross - Border Business and Investment Forum



Ketua Bidang Perdagangan APINDO Anne Patricia Sutanto menjadi salah satu panelis dalam Indonesia Cross - Border Business and Investment Forum yang diselenggarakan atas kolaborasi antara Sidley, FTI Consulting, dan Mandala Consulting, Selasa (25/6/2024) di Glass House, Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan pelaku usaha dalam dan luar negeri, membahas tantangan dan peluang bagi perusahaan Indonesia di pasar global.

Hadir juga sebagai Panelis dalam diskusi ini: Deputi Menteri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Septian Hario Seto, Senior Managing Director FTI Consulting Gino Bello, Partner Sidley Tai-Heng Cheng dan Yuet Ming Tham. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO, Catharina Widjaja.

Dalam forum yang bertajuk "Enhancing Success and Navigating Challenges for Indonesian Companies Operating in Global Market", Anne Patricia Sutanto yang juga Wakil Presiden PT Pan Brothers Tbk menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk mencapai kerja sama ekonomi baik secara bilateral maupun multilateral, khususnya dalam konteks EU CEPA.

Anne, dalam kapasitasnya mewakili APINDO, juga menekankan pentingnya kemauan politik (political will) untuk segera menyelesaikan EU CEPA.

Dia menyatakan bahwa perjanjian ini sangat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengajak seluruh pelaku usaha untuk percaya diri bersaing dengan pelaku usaha internasional, dengan syarat tidak ada diskriminasi dalam penerapan kebijakan.



Septian Hario Seto menjelaskan bahwa advokasi pemerintah terhadap komoditas seperti nikel sudah sangat realistis. Seto berharap agar mitra dagang, khususnya negara-negara maju, memahami bahwa Indonesia sedang berusaha untuk menjadi negara yang lebih berdaya saing. Dia juga menggarisbawahi tren proteksionisme yang meningkat tajam dari negara-negara maju yang selama ini mendukung ekonomi kapitalis.



APINDO Gelar Members Gathering Lindungi Bisnis dari Suap & Korupsi



APINDO bersama Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyelenggarakan Members' Gathering APINDO bertema "Melindungi Bisnis dari Suap dan Korupsi: Memahami dampak undang-undang antikorupsi terhadap bisnis", Selasa (25/6/2024) di Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan menyampaikan peraturan anti-korupsi yang sedang berlaku dan akan berlaku di Indonesia serta sebagai ajang sharing best practices dalam pengimplementasian sistem anti-korupsi atau anti-suap di perusahaan.

Acara dibuka oleh Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga APINDO Sarman Simanjorang dan Ketua Taskforce KAKI Andi Ilham Said.

Dilanjutkan sesi pemaparan oleh narasumber AVP Premium Content Hukum Online Christina Desty, Head of Legal PT Max Power Indonesia Deden Kurniawan yg dipandu oleh moderator Noviandri Dafturi, Pengurus Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO.



Sarman mengungkapkan dalam era globalisasi, bisnis tidak hanya dihadapkan pada tantangan kompetitif tetapi juga pada risiko hukum kompleks termasuk isu suap dan Korupsi.

Korporasi diharapkan mampu mengadopsi dan mengimplementasi Panduan Pencegahan Korupsi untuk Korporasi yang diterbitkan oleh KPK.

Acara ditutup oleh Aloysius Budi Santoso, Sekretaris Umum APINDO yang menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi KAKI dengan APINDO.

APINDO Partisipasi dalam Konsultasi Nasional Penyempurnaan Panduan Fasilitas Kesejahteraan



APINDO hadir dalam Konsultasi Nasional Penyempurnaan Panduan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan ILO Jakarta, Selasa (25/6/2024) di Jakarta.

Hadir sebagai pembicara Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Bidang Ketenagakerjaan APINDO Myra M. Hanartani. Hadir mendampingi Ketua Komite K3 Bidang Ketenagakerjaan APINDO, dr. Rima Melati.

Dalam Konsultasi tersebut dibahas pandangan APINDO sebagai berikut: Perlunya dipertegas dan difokuskan apakah instrumen ini mengenai Fasilitas Kesejahteraan Pekerja yang mengacu kepada pasal 100 UU no. 13/03 atau mengatur juga tentang substansi K3 yang sebetulnya sudah memiliki instrumennya tersendiri.

Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sesuai kemampuan, pengaturan K3 merupakan normatif. Mengingat peta badan usaha di Indonesia yang mayoritas adalah usaha mikro dan kecil, hal yang krusial adalah bagaimana fasilitas kesejahteraan pekerja ini diimplementasikan kepada usaha tersebut berikut monitoringnya.



APINDO Diskusi Bersama Pelaku Usaha, Pakar Ekonomi, Akademisi & Pimpinan Redaksi Media Bahas Kondisi Perekonomian Indonesia



APINDO menggelar diskusi bersama pelaku usaha, pakar ekonomi, akademisi dan pimred media terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kamis (27/6/2024) di kantor APINDO.

Sejumlah pakar ekonomi dan akademisi serta pelaku industri dan media menyampaikan pandangan terkait gambaran situasi perekonomian Indonesia beberapa waktu terakhir.

Hadir dalam diskusi tersebut, diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan APINDO Tigor M. Siahaan.

Sejumlah pakar ekonomi dan akademisi serta pelaku industri dan media menyampaikan pandangan terkait gambaran situasi perekonomian Indonesia beberapa waktu terakhir.

Dalam kegiatan tersebut para pakar, pelaku industri dan media menilai perlu ada sejumlah langkah yang dilakukan guna mengantisipasi situasi perekonomian Indonesia yang masih dalam situasi ketidakpastian.

Untuk itu kedepannya para peserta secara garis besar akan lebih mempererat komunikasi lintas bidang guna menyamakan langkah dalam menyikapi situasi perekonomian Indonesia ke depannya. Terutama dalam beberapa bulan kedepan akan dilaksanakan transisi kekuasaan kepada presiden terpilih mendatang.

APINDO Tingkatkan Potensi Kerjasama Investasi dengan Tiongkok



APINDO menggelar Indonesia-China Enterprises Investment Cooperation Matchmaking Meeting bersama Investment Promotion Agency of the Ministry of Commerce of China (CIPA) dan China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), Kamis (27/6/2024) di kantor APINDO.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Bidang Hubungan Internasional (HI) APINDO Catharina Widjaja, Wakil Ketua Bidang HI APINDO Didit Ratam, Ketua Komite Asia Pasific Bidang Hubungan Internasional APINDO Adi Harsono, Deputy Director General CIPA Yu Guangsheng, Minister-Counselor of Economic and Commercial Office Kedutaan Besar China di Indonesia Li Hongwei, Deputy General of Inspur Group Zhao Jie, dan Founder & President of Gladtrust Management Co., Ltd Song Shuda.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani dalam sambutannya mengungkapkan, menandai komitmen APINDO untuk memperluas jaringan bisnisnya dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi kedua negara. Untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi, di acara ini akan diadakan juga B2B Networking dengan tujuan untuk menjelajahi peluang kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.



President of the Council CCCI, Xue Baohua mengatakan pihaknya berharap kerjasama ekonomi dan perdagangan semakin meningkat dan mendorong pengembangan industri serta rantai pasok.

Direktur Promosi Investasi BKPM untuk Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Cahyo Purnomo mengungkapkan jika pada kuartal pertama 2024, Tiongkok menempati peringkat kedua setelah Singapura pada realisasi investasi. Untuk itu, diharapkan realisasi investasi dari Tiongkok ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Lokasi investasi Tiongkok di Indonesia juga semakin tersebar merata sehingga pusat pertumbuhan ekonomi baru tercipta di Indonesia.

Pengurus Bidang Ketenagakerjaan APINDO dalam Workshop Pengembangan & Peningkatan Keterampilan bagi Sektor Industri dan Manufaktur



Ketua Komite Pengembangan dan Pelatihan SDM APINDO, Lispiyatmini mengikuti Workshop Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan di Asia Selatan bagi Sektor Industri dan Manufaktur, Kamis – Jumat (28-29/6/2024) di New Delhi, India.

Workshop diinisiasi oleh the International Organization of Employers (IOE), the Global Apprenticeship Network (GAN), the Confederation of Indian Industry (CII), dan the Employers Federation of India (EFI).

Dalam workshop disampaikan 5 tren global yang membentuk cara bisnis beroperasi, yaitu: transformasi digital dan teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, globalisasi, dan kurangnya keterampilan.

Lispiyatmini menyampaikan sejumlah inisiatif spesifik dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, diantaranya dengan kolaborasi institusi Pendidikan, Perusahaan, dan pemerintah.



Institusi Pendidikan diharapkan mampu menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri kerja. Untuk itu, diperlukan tinjauan dan adaptasi kurikulum secara reguler, termasuk dengan memperkuat soft skill pada pendidikan usia dini.

Perusahaan diharapkan mampu memberikan pelatihan kepada supervisor dalam mendukung program pemagangan, terlibat secara aktif melalui CSR terkait dukungan kepada pendidikan, menyediakan program peningkatan keterampilan bagi pekerja, dan komitmen manajemen dalam pengembangan dan peningkatan keterampilan, termasuk beradaptasi dalam memperhatikan gen Z.

Sementara itu, pemerintah diharapkan memiliki regulasi kuat bagi seluruh industri, termasuk UMKM untuk memiliki pemagangan sebagai program wajib, melakukan sentralisasi kewenangan kejuruan seperti India yang memiliki Kementerian pengembangan keterampilan & kewirausahaan, Dewan Nasional untuk Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Pemerintah India. Pemerintah juga dapat melakukan benchmark di negara seperti Singapura, Malaysia, dan India dalam rangka mendapatkan best practices untuk membangun kebijakan, kerangka pembelajaran seumur hidup.



APINDO DAERAH

Kunjungan Komandan Denpom II/5 Sriwijaya ke DPP APINDO Bangka Belitung

Komandan Denpom II/5 Mayor Cpm Harry Mulia Simarmata, S.H., M.H.I. melakukan kunjungan ke kantor Sekretariat DPP APINDO Bangka Belitung (Babel) dalam rangka sillaturrahi dan penjajakan hubungan kerja sama dan sinergisitas sesuai fungsi dan peranan Detasmen Polisi Militer Bangka. Pada kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua IV & Para Ketua Bidang, Selanjutnya di kesempatan berikutnya akan dijadwalkan kunjungan balasan DPP APINDO Babel ke Kantor Denpom Bangka.

Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (FKLPID BPVP) Belitung

Ketua DPP APINDO Bangka Belitung (Babel) Nuradi Wicaksono yang sekaligus merupakan Wakil Ketua FKLPID BPVP BELITUNG Periode Tahun 2024-2027 turut menghadiri dan membersamai kegiatan pengukuhan dan pembahasan rencana & program kerja FKLPID bersama pelaku usaha, industri, organisasi, dinas terkait dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Nuradi menyampaikan selamat dan sukses kepada Fajar Kawolu yang juga sekaligus Sekretaris Umum DP Kabupaten APINDO Belitung dengan dikukuhkan sebagai Ketua FKPID BPVP Belitung. Nuradi menambahkan, APINDO memberi dukungan penuh guna karya terbaik melalui forum pelatihan vokasi dan produktifitas.



DPP APINDO Jawa Timur Gelar Dialog Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan



DPP APINDO Jawa Timur (Jatim) bersama Kadin Jatim dan Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan mengadakan pertemuan melalui kunjungan perusahaan untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi dari sejumlah perusahaan terkait layanan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 4 Permenakertrans No. 10 tahun 2012.

Melalui dialog langsung, kegiatan tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan regulasi ketenagakerjaan. Saran dan masukan yang diperoleh akan menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif.

Dengan adanya kolaborasi antara DPP APINDO Jatim, Kadin Jatim, Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan, acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara regulator dan pelaku usaha. Partisipasi aktif dari semua pihak dalam dialog ini akan membantu menemukan solusi bersama untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial dan memastikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di Jawa Timur.

DPP APINDO Jawa Timur Gelar Dialog Bersana Jajaran Bea Cukai



DPP APINDO Jawa Timur kembali mengadakan berdialog dengan Direktur Jenderal Bea Cukai beserta jajaran, Jumat (14/6/2024). Dialog ini menjadi wadah penting untuk mempererat hubungan dan kerjasama antara dunia usaha dan pihak Bea Cukai.



Dialog ini diharapkan dapat memperjelas kondisi ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal impor, masalah Persetujuan Teknis, Larangan dan Pembatasan, Bea Masuk Impor, Jasa Titipan, impor ilegal, dan isu-isu terkait pelabuhan tikus. Diskusi juga mencakup penjelasan mengenai fasilitas-fasilitas terbaru yang disediakan oleh Bea Cukai untuk mendukung dan memperbaiki kinerja industri di Jawa Timur. Semua ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para pelaku industri mengenai aturan dan kebijakan yang berlaku.

Melalui pertemuan ini, DPP APINDO Jawa Timur berharap dapat menguatkan industri yang berorientasi ekspor di wilayahnya. Penjelasan dan klarifikasi dari pihak Bea Cukai diharapkan dapat membantu para pelaku industri dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri Jawa Timur di pasar global. Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.



DPP APINDO menggelar APINDO Gathering dengan mengundang seluruh Anggota APINDO Bali dan juga Non Anggota, Rabu (12/6/2024) di Bali. Pertemuan diselenggarakan dalam rangka pembahasan PERPRES NO.59 Tahun 2024 Tentang Jaminan Kesehatan dan Update Permasalahan Hubungan Industrial. Hadir sebagai keynote speaker Ketua Dewan Pertimbangan DPP APINDO Bali Ajik Krisna dan Mediator Disnaker ESDM Provinsi Bali I Gst Ngr Rai Winansa sebagai Narasumber. Anggota DPP APINDO Bali juga diberikan pelayanan konsultasi karena DPP APINDO Bali memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).



Ketua Umum APINDO Kunjungi DPP APINDO Bali Dorong Bisnis antar Anggota APINDO Seluruh Indonesia



Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani berdiskusi dengan Ketua DPP APINDO Bali I Nengah Nurlaba dalam kunjungannya di Bali, Sabtu (29/6/2024).

Dalam diskusi tersebut, Shinta menyampaikan kondisi ekonomi terkini, juga berkaitan dengan respon APINDO terhadap rencana penerapan Tapera, Pelemahan nilai Rupiah, dan harapan pelaku usaha terhadap pemerintahan baru untuk bisa lebih memperhatikan dunia usaha.

Dalam kunjungan tersebut, Shinta juga memperkenalkan Direktur International Strategic Partnership Center (ISPC) baru, Cahya.



Valiant Visuals
STUDIO



ISPC merupakan sebuah business unit APINDO yang dibentuk untuk mendorong terjalinnya Hubungan bisnis antar Anggota APINDO di seluruh Indonesia, baik dengan pengusaha nasional maupun internasional. Terutama dalam rangka mendorong produk - produk UMKM agar dapat go nasional maupun internasional.

DPP APINDO Bali Adakan Sosialisasi Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan

DPP APINDO Bali menggelar Sosialisasi Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, Rabu (19/6/2024) di Bali. Wakil Ketua VIII Bidang Hubungan Industrial DPP APINDO Bali Putu Sugiarta Adnyana menjadi Moderator dalam Sosialisasi UU. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang – undang dalam Pembinaan Badan Usaha.



DPP APINDO Kepulauan Riau Kunjungan ke Walikota Batam



Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau Stanly Rocky dan Wakil Ketua Pieter Wijaya melakukan Kunjungan ke Kantor Walikota Batam dalam rangka Silaturahmi dan bertemu langsung dengan Walikota Batam Muhammad Rudi, Kamis (13/6/2024).



53

DPP APINDO Kepulauan Riau Roadshow Kunjungan ke Perusahaan

Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau Stanly Rocky dan Wakil Ketua Pieter Wijaya melakukan Kunjungan ke PT. Batam DexiPlastics Indonesia dalam rangka Silaturahmi dan bertemu langsung dengan Pimpinan Perusahaan Mr. Sun Gang, Jumat (14/6/2024).



PT. BATAM DeXiPlastics Indonesia



54

DPP APINDO Jawa Barat Gelar Pembekalan, Pembinaan & Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan



Wakil Ketua Bidang Diklat, Litbang, Produktivitas, K3 dan Sertifikasi DPP APINDO Jawa Barat, Rosa Haryani Setiawati menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Sensitivitas Disabilitas Kemenaker oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu – Jumat (19-21/6/2024) dengan membawakan materi mengenai Dunia Kerja Inklusif.

Kegiatan ini bertujuan agar para pemangku kepentingan memiliki empati dan kepekaan yang tinggi dalam membantu memfasilitasi dan mendampingi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal khususnya, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan inklusi disabilitas di bidang ketenagakerjaan.

Pada Kamis (20/6/2024), Rosa juga menjadi narasumber dalam kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.



Ia memaparkan Prinsip Kesetaraan & Nondiskriminasi di Tempat Kerja Yang Kompetitif dan Produktif (Panduan Kesetaraan dan Inklusivitas di Tempat Kerja/Panduan Ketenagakerjaan Inklusif dari dan untuk Sektor Swasta).

Dalam kesempatan tersebut, Rosa menegaskan agar pemerintah dapat memfasilitasi baik insentive ataupun supply kompetensi disabilitas dan diharapkan pemerintah bukan based on mandatory dalam mengajak perusahaan mewujudkan UU 6 tahun 2016. Acara ini diharapkan dapat terjalinnya hubungan antara pemangku kebijakan, pengusaha dan disabilitas untuk mencapai lingkungan kerja yang inklusif.

Audiensi Buruh bersama Gabungan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Jawa Barat 24 Juni 2024



Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik DPP APINDO Jawa Barat Yohan Ibrahim dan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPP APINDO Jawa Barat Komaruddin Khalid menghadiri kegiatan Audiensi Buruh bersama Gabungan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Jawa Barat terkait pembahasan Upah bagi Pekerja/Buruh yang masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun ke atas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Senin (24/6/2024) di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.



DPP APINDO Jawa Barat Gelar FGD bersama Kementerian Perdagangan

DPP APINDO Jawa Barat melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Perdagangan dalam rangka pelaksanaan “Analisis Penerapan Local Currency Transaction (LCT) dalam Perdagangan Luar Negeri Indonesia” yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan (Puska EIPP), Rabu (26/6/2024).



Kunjungan Kerja Dewan Pengupahan DPP APINDO Provinsi Riau Bersama Dinas Tenaga Kerja NTB



Tim Dewan Pengupahan APINDO Riau turut serta kunjungan kerja Dewan Pengupahan Provinsi Riau ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin – Kamis (24 – 27/6/2024). Hadir Wakil Ketua Agus Setiawan, Bukhari dan Zulfikar untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ketua DPP APINDO Nusa Tenggara Barat.



DPP APINDO Riau Wisuda Mahasiswa Batch 1 APINDO UMKM Merdeka

DPP APINDO Riau menggelar acara Graduasi Mahasiswa Batch 1 APINDO UMKM Merdeka (AUM) Riau, Senin (24/6/2024) di Pekanbaru.

Hadir pada kegiatan Graduasi Mahasiswa Batch 1 AUM Riau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau diwakili Zubir, Kepala LLDIKTI wilayah X, Eri Suryadi Kepala SKK Migas Sumbagut, Vallerina, PT. RAPP, Sundari Berlian, PT. Astra Agro Lestari, Angga Febryan, PT Perkebunan Nusantara IV, Azzanu Asy'ari, Universitas Muhammadiyah Riau, Silvia Elki Putri, BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, PT. Sarana Pembangunan Riau, Pengurus DPP APINDO dan DPK APINDO Pekanbaru, para mahasiswa peserta magang AUM Riau, mentor dan UMKM.



DPP APINDO Sulawesi Tengah Dukung Transisi Energi Berkeadilan



DPP APINDO Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi narasumber dalam Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) bertema Transisi Energi Berkeadilan yang digelar Federasi Pertambangan dan Energi, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulteng di Palu, Minggu (23/6/2024).

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Sulteng, Udin Salim dalam paparannya mengatakan APINDO mendukung transisi energi berkeadilan dengan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perubahan menuju energi terbarukan dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan sektor-sektor tertentu atau kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Udin, APINDO memandang pendekatan yang holistik dan inklusif maka transisi energi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Udin menambahkan, sedikitnya ada enam hal yang perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan transisi energi yang berkeadilan.



Pertama, stabilitas ekonomi. APINDO menekankan pentingnya memastikan bahwa transisi energi tidak mengganggu stabilitas ekonomi. “Ini termasuk mempertahankan daya saing industri dan melindungi lapangan pekerjaan di sektor energi dan sektor terkait lainnya,” ujar Udin.

Kedua, perlunya investasi yang signifikan dalam infrastruktur energi terbarukan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung transisi energi. APINDO menggarisbawahi pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam hal ini.

Ketiga, perlu pelatihan dan pendidikan bagi pekerja, terutama pekerja di sektor energi fosil untuk beralih ke pekerjaan di sektor energi terbarukan. APINDO melihat ini sebagai kunci untuk memastikan bahwa transisi energi tidak menyebabkan pengangguran massal.

Keempat, selain regulasi yang memudahkan transisi energi, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan.

Kelima, kepastian hukum dan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting agar perusahaan dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih baik.

Keenam, perlunya pelibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, pemerintah, pekerja, dan masyarakat, dalam proses transisi energi. APINDO menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam workshop yang melibatkan puluhan pekerja dari dua serikat pekerja itu, hadir pula sebagai narasumber Sekjen DPP FPE KSBSI (Federasi Pertambangan dan Energi), Nikasi Ginting dan Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Indra Jaya.

Diskusi menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya hasil diskusi tersebut akan diusulkan ke DPRD Sulteng untuk menjadi bahan rancangan peraturan daerah.

DPP APINDO Sumatera Barat Bicara Penerapan Norma 100 di Perusahaan



DPP APINDO Sumatera Barat (Sumbar) yang diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi Candrianto, menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar bertema Penerapan Norma 100 di Perusahaan, Senin (24/6/2024).

DPP APINDO Sumbar akan mensosialisasikan norma 100 kepada setiap Perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Sumatera Barat dengan harapan Perusahaan akan lebih sadar dan menerapkan K3 dengan baik dan benar.

Dengan demikian, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengukur kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang aman.



DPP APINDO Sumatera Barat Adakan Business Forum

DPP APINDO Sumatera Barat menggelar agenda rutin bulanan, Business Forum, Rabu (19/6/2024).

Tema forum kali ini adalah “English for Business” yang diharapkan semakin meningkatkan jaringan bisnis para pengusaha Sumatera Barat, salah satunya dalam aktivitas ekspor ke luar negeri.

DPP APINDO Jawa Tengah Koordinasi dengan Bank Indonesia Terkait APINDO Merdeka



DPP APINDO Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi dengan Bank Indonesia Terkait APINDO UMUM Merdeka, Selasa (4/6/2024) di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Semarang.



DPP APINDO Jawa Tengah Partisipasi Rakor Pembangunan Ketenagakerjaan & Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

DPP APINDO Jawa Tengah berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Senin (10/6/2024) di Surakarta.

DPP APINDO Jawa Tengah Bicara Dalam Workshop Mitigasi Hukum



DPP APINDO Jawa Tengah menjadi narasumber dalam Workshop Mitigasi Hukum dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Perusahaan yang Tangguh, Kamis (27/6/2024) di Tegal.

DPP APINDO Daerah Khusus Jakarta Gelar Konferensi Pers Tapera Bersama Serikat Pekerja



DPP APINDO Daerah Khusus (DK) Jakarta bersama tujuh Serikat Pekerja DK Jakarta membuat pernyataan bersama agar Pemerintah membatalkan implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada Perusahaan dan Pekerja Swasta sebagai suatu kewajiban, Senin (10/6/2024) di kantor DPP APINDO Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan DPP Apindo DKI Jakarta, Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI), FSP Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI KSBSI) serta FSP Serikat Pekerja Nasional (SPN/KSPI).

Selain itu FSP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), FSB Kimia Industri Umum, Farmasi, Kesehatan (KIKES), FSP Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF) dan FSP Kimia Energi Pertambangan (KEP).



DPP APINDO Daerah Khusus Jakarta Aktif dalam LKS Tripartit & Dewan Pengupahan



DPP APINDO Daerah Khusus (DK) Jakarta terlibat secara aktif dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit lima wilayah serta menggelar sejumlah pertemuan serta diskusi dengan anggota Dewan Pengupahan.

DPP APINDO Daerah Khusus Jakarta Gelar Kelulusan Program APINDO UMKM Merdeka – MSIB Batch 6

DPP APINDO Daerah Khusus (DK) Jakarta menggelar kelulusan (graduation) program APINDO UMKM Merdeka – Magang & Studi Independen Bersertifikat (AUM - MSIB) Batch 6 tahun 2024, Kamis (27/6/2024). Program AUM-MSIB Batch 6 Tahun 2024 (Periode Januari - Juni 2024) telah terlaksana dan terpenuhi dengan baik dan lancar.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raperda Bersama DPP APINDO DIY Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

DPP APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diwakili Supri Harsono hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Pansus DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (13/6/2024) di DPRD Kota Yogyakarta.

Rapat ini ditujukan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dalam rangka menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta.



DPK APINDO Sleman Dalam Bimtek Sinkronisasi Kurikulum Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI)



Ketua DPK APINDO Sleman, Petrus Tedja Hapsoro menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kurikulum Merdeka Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (10/6/2024) di Yogyakarta.

Petrus yang juga Direktur PT. Yoga Presisi Tehnikatama Industri (PT.YPTI) dalam kapasitasnya sebagai pelaku dunia usaha yang bergerak dalam bidang manufacture menyampaikan materi bertema “Peran Industri dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK”

Anggota Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dari Unsur APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Anbier Rubby P.B.B didampingi Sekretaris 1 DPP APINDO DIY Supri Harsono, hadir dalam kegiatan Lokakarya Pengembangan Strategi Vokasi Daerah (Strada) di Provinsi DIY, Jumat (14/6/2024) di Yogyakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden No.68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan mengacu pada Strategi Nasional Vokasi sebagaimana diatur dalam Permenko PMK No. 6 Tahun 2022.



SAVE THE DATE



RAKERKONAS APINDO XXXIII

**Sinergi Pengusaha & Pemerintah:
Memastikan Kualitas Regulasi dan Peran Birokrasi
dalam Memperlancar Kegiatan Usaha**



**28 - 30 Agustus 2024
Novotel Samator Hotel**

SAVE THE DATE



PEMANTAPAN NILAI – NILAI KEBANGSAAN Pengusaha Kuat, Ketahanan Nasional Tangguh

 9 – 15 September 2024 di Lemhannas RI

PEMATERI



Shinta W. Kamdani
Ketua Umum APINDO



Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc.
Deputi Pemantapan Nilai – Nilai Kebangsaan



Letjen TNI Eko Margiyono
Plt. Gubernur Lemhannas RI



Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra
Sekretaris Utama Lemhannas RI

KETENTUAN

1. Peserta wajib mengisi Link Pendaftaran
2. Belum pernah mengikuti Pembinaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI
3. Wajib berkomitmen mengikuti pelatihan selama 7 hari penuh
4. Pendidikan terakhir minimal SLTA
5. Wajib mematuhi semua tata tertib pelatihan berlangsung

REGISTRASI: SCAN DI SINI

29 April – 31 Agustus 2024



Further Info: Edi Silaban
0813 -1744 -4057 (WA Only)

TESTIMONI ALUMNI TAPLAI APINDO



Irwanda Syarif Hamdani
Anggota Komite
Hubungan Antar Lembaga APINDO

“Dengan mengikuti Program Taplai, saya bisa mengetahui cara pandang serta membentuk pola pikir berwawasan kebangsaan yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan”

TAPLAI

TAPLAI



PERMOHONAN PENGISIAN SURVEI



Saat ini APINDO tengah menjalankan beberapa survei yang bertujuan mendapatkan masukan untuk program advokasi dan kegiatan APINDO. Kami mengharapkan dukungan Bapak/ Ibu dengan mengisi survei yang kami sampaikan, yaitu:



Survei Penerapan Struktur & Skala Upah (SUSU) di Perusahaan <https://bit.ly/SUSU2024>

Survei Sertifikasi Keahlian

<https://forms.gle/XGDPx9xnkNgRw1fw8>



Survei Pelaksanaan Program Pendidikan di Perusahaan bit.ly/APDEduPrograms

Lama pengerjaan untuk masing-masing survei adalah 2 – 5 menit. Informasi yang Bapak/ Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan dengan bijaksana.

Pengisian survei dapat dilakukan selambatnya Kamis, 11 Juli 2024. Partisipasi Bapak/ Ibu akan sangat berarti bagi APINDO dalam memberikan layanan yang terbaik untuk Anggota.

Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.

Ikuti Update dari APINDO



[apindo.nasional](#)



Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO)



[apindonasional](#)



[APINDO Nasional](#)



[apindonasional](#)



[apindo.or.id](#)

Hubungi Tim Komunikasi APINDO untuk kolaborasi konten dan kerjasama lainnya



ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

TIM KOMUNIKASI APINDO



SEKRETARIAT DPN APINDO

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav.9C
Guntur, Setiabudi, Jakarta 12980



(+6221) 8378 0824



(+6221) 8378 0823 / 8378 0746



sekretariat@apindo.or.id